BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 *Output* Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Memberdayakan SIM SP3 Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Kemajuan tekonologi dan informasi merupakan realita yang harus dihadapi dan tidak dapat dihindari di era modern. Pesatnya perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang menginginkan adanya kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju merupakan peluang bagi setiap instansi dan lembaga pemerintahan untuk dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam rangka meningkatkan pembangunan ditingkat nasional maupun daerah. Upaya untuk mengefektifkan penggunaan teknologi dan informasi dilembaga pemerintahan merupakan upaya dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi sehingga masyarakat mudah mendapatkan informasi.

Sistem informasi merupakan sistem sosial yang menjadi bagian dari sistem kesehatan bahkan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Sebagai sistem sosial, penerapan sistem informasi tidak dapat diberlakukan seperti mesin (*mindless system*) atau seperti makhluk hidup dengan satu otak (*uniminded system*). Perubahan yang cukup fundamental dalam pengembangan dan penerapan SIK

dapat diketahui dari, pertama perilaku pencatatan dan pelaporan, kedua Pemrosesan, penyajian, dan pemanfaatan data sebagai informasi dan pengetahuan, ketiga Integrasi informasi dan pengetahuan dengan proses-proses pelayanan kesehatan individu maupun masyarakat. SIM SP3 sebagai Sistem Pencatatan dan Pelaporan kegiatan yang berfungsi untuk mengolah data mengenai laporan bulanan dan laporan tahunannya. Salah satu tujuan khusus dari SIM SP3 yaitu diperolehnya satu sumber data yang dapat dipakai, dimanfaatkan data dengan benar, akurat dan sama.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan suatu instansi dimana pemerintahnya memanfaatkan penggunaan teknologi informasi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyediaan sarana teknologi informasi yang dijumpai di lembaga pemerintahan. Disamping di lembaga pemerintahan, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat di aplikasikan melalui suatu sistem yang disebut dengan Sistem Informasi. Sistem informasi yang ada di Dinas Kesehatan sangat beragam jenisnya, antara lain yang ada di bidang Teknologi Informasi Kesehatan (TIK) yaitu aplikasi SIM SP3 dan SIRS. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pada penggunaan teknologi komputer dan Sistem Informasi telah mendorong aparatur menjalankan tugasnya lebih cepat dan efektif sehingga terwujudnya kinerja aparatur yang optimal.

Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan kinerja kepegawaian berusaha untuk memberdayakan SIM SP3 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini merupakan salah satu dorongan

dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat dikatakan bahwa kemajuan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi.

Kinerja aparatur dalam melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan dan mengambil langkah-langkah pelayanan yang akurat dan cepat dalam pembangunaan teknologi informasi perlu diwujudkan. Melalui SIM SP3 yang bertujuan untuk mewujudkan penggunaan teknologi informasi pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam melayani masyarakat. Penggunaan SIM SP3 menginginkan adanya kinerja aparatur dan langkah-langkah yang jelas dalam rangka mewujudkan pembangunan kesehatan di segala bidang. Penggunaan SIM SP3 diharapkan dapat menggali kinerja yang lebih optimal baik oleh aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota maupun Provinsi. Instruksi ini merupakan kinerja aparatur Dinas Kesehatan dalam memberdayakan Sikda melalui SIM SP3 yang dikelola oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada bidang TIK dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan organisasi.

Kinerja aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian suatu hasil yang sangat dirasakan keberadaannya, apabila kinerja aparatur tidak dilaksanakan dengan tepat, maka hasil akhir tidak akan tercapai dengan memuaskan. Kinerja aparatur dapat dicapai hasil akhir yang sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah ditentukan, maka fungsi kinerja harus mampu

berjalan seefektif mungkin. Setiap kriteria kinerja memiliki sasaran berupa jalur khusus untuk perbaikan serta memiliki bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya terhadap tujuan organisasi. Kinerja aparatur menjadi tanggungjawab dari suatu kegiatan berdasarkan bobot dan skor untuk setiap kriteria yang dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan *output* instansi dan memberikan perbaikan yang menuju pada peningkatan *output* di masa datang.

Output sebagai suatu hasil yang dihasilkan langsung dirasakan dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. *Output* meliputi, pertama kualitas Pelayanan yang diberikan adalah bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, kedua kuantitas pelayanan yang diberikan adalah bagaimana kuantitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Output yang berasal langsung dari kualitas dan kuantitas suatu kegiatan yang berupa fisik maupun non fisik, dari kegiatan yang berupa fisik yaitu penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mendukung SIM SP3 seperti seperangkat komputer jaringan internetnya. Sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kurang mendukung karena setiap komputer yang ada di Dinas Kesehatan tidak terhubung ke internet sehingga dalam penerimaan dan

pengiriman data masih dilakukan secara manual melalui email *SP3_jabar@yahoo.co.id.*

4.1.1 Kualitas Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Memberdayakan SIM SP3 Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik.

Pelayanan yang mempunyai kualitas yang baik yaitu memiliki ciri-ciri seperti tidak prosedural (birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi serta berorientasi kepada pelanggan. Sinambela mengatakan bahwa kualitas pelayanan prima tercermin dari pertama transparasi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, kedua akuntabilitas yaitu pelayanan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketiga kondisional yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas, keempat partisipatif yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan

dan harapan masyarakat, kelima kesamaan hak yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan dan status sosial, keenam keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan mengenai *output* di atas, maka dapat diketahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat, yang mana kualitas merupakan suatu kegiatan yang diberikan melalui jasa seseorang kepada orang lain (masyarakat). Kualitas yang diberikan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yaitu berupa pelayanan kepada masyarakat, dengan cara memberikan pelayanan melalui SIM SP3 aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berharap dapat memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat mengenai informasi kesehatan.

Kualitas layanan yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menunjukkan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima melalui proses SIM SP3. Oleh karena itu, kualitas layanan akan berhasil dengan baik apabila informasi yang disampaikan dapat di terima dan di mengerti oleh masyarakat. Kualitas layanan merupakan suatu konsep yang dapat dimaknai sebagai proses dimana masyarakat dapat mengetahui kinerja aparatur, di mana hal tersebut merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan pelayanan yang efektif. Pada dasarnya, SIM SP3 memberikan kontribusi besar pada kinerja aparatur yaitu memudahkan kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

dalam mengolah data dan memberikan pelayanan atau kepuasan kepada masyarakat agar dapat menciptakan pelayanan yang efektif, karena tanpa adanya kualitas layanan informasi yang baik mengenai informasi kesehatan maka SIM SP3 tidak akan berjalan dan masyarakat juga tidak akan mendapatkan kepuasan atas kinerja aparatur dan mengetahui informasi kesehatan.

Pemberdayaan SIM SP3 yang dilakukan oleh Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan cara untuk menigkatkan *output* di masa yang akan datang, baik bagi organisasi ataupun masyarakat. Peningkatan *output* melalui SIM SP3 dapat memudahkan organisasi (Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adapun bagi masyarakat dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kesehatan dari aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Pengembangan sumber daya aparatur dalam memberdayakan SIM SP3 yang dilakukan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat secara konseptual dapat juga mengubah sikap aparatur terhadap pekerjaan. Hal ini disebabkan karena pemahaman pegawai terhadap pekerjaannya juga berubah, karena sikap seseorang aparatur memiliki elemen-elemen kognitif, yaitu keyakinan dan pengetahuan seseorang terhadap suatu obyek. Pengembangan sumber daya aparatur merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan aparatur dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Barat. Proses peningkatan disini mencakup perencanaan pengembangan dan pengelolaan SDM.

SDM perlu dikembangkan secara terus menerus agar memperoleh SDM yang bermutu dalam arti yang sebenarnya, yaitu pekerjaan yang dilaksanakannya menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai. Kemampuan SDM dalam suatu organisasi harus terus menerus ditingkatkan seirama dengan kemajuan dan perkembangan organisasi.

Menurut aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, menjelaskan bahwa kualitas aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui ketersediaan sumber daya aparatur merupakan hal yang mutlak di perlukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan SIM SP3 di Dinas Provinsi Jawa Barat. Sumber daya aparatur, merupakan kebutuhan mutlak yang harus dilaksanakan pada setiap kinerja aparatur yang berkompetensi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar pelayanan.

Pengembangan sumber daya aparatur di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat diarahkan kepada pembentukan kualitas layanan kepada masyarakat melalui SIM SP3 dalam peningkatan sumber daya diterapkan, supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan SIM SP3. Pengoperasian SIM SP3 sangat membutuhkan aparatur yang ahli dalam bidang teknis untuk mengoperasionalkan dan mengaplikasikan data-data mengenai kesehatan yang tersimpan dalam aplikasi SIM SP3.

Berdasarkan uraian diatas ketersediaan sumber daya aparatur merupakan hal yang mutlak untuk menjamin keberhasilan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, pengembangan sumber daya aparatur di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat diarahkan kepada pembentukan kualitas layanan kepada masyarakat melalui SIM SP3.

4.1.2 Kuantitas Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Memberdayakan SIM SP3 Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Penjelasan *output* diatas, dapat diukur dari segi bagaimana kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kuantitas merupakan sesuatu yang dapat memenuhi uji kualitas dalam artian bahwa kuantitas dapat dikatakan sebagai suatu syarat untuk memenuhi uji kualitas sendiri, dimana dari kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dapat dikatakan masih belum optimal, karena kuantitas aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam mengolah data sampai pengeluaran berupa informasi mengenai kesehatan masih kurang cepat dan akurat.

Pemberdayaan SIM SP3 yang dilakukan oleh Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan cara untuk menigkatkan *output* di masa yang akan datang, baik bagi organisasi ataupun masyarakat. Peningkatan *output* melalui SIM

SP3 dapat memudahkan organisasi (Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, adapun bagi masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kesehatan dari aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Meskipun kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat belum optimal, namun dengan memberdayakan SIM SP3 diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat mengenai kesehatan.

Output yang diukur dari segi kuantitas dapat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sendiri, dimana jika kualitas dari pelayanan yang diberikan baik maka kuantitas yang dihasilkan juga akan baik, adapun sebaliknya jika kualitas pelayanan yang diberikan tidak baik maka kuantitasnya juga tidak akan baik. Seperti yang telah dijelaskan diatas kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dapat dikatakan masih belum optimal, karena kuantitas aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam mengolah data sampai pengeluaran berupa informasi mengenai kesehatan masih kurang cepat dan akurat.

Berdasarkan adanya pemberdayaan SIM SP3 aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengaharapkan dapat lebih mengoptimalkan kuantitasnya sesuai kulaitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terhadap para aparaturnya merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus, karena pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk pengembangan SDM yang ada di

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Organisasi harus berkembang, untuk itu kemampuan dari para aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat harus terus menerus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan organisasi.

Pengembangan SDM ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari aparatur yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan aparatur untuk mencapai suatu hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, kuantitas dipengaruhi oleh persentase keahlian aparatur yang bergerak dibidangnya, seperti contoh untuk penggunaan SIM SP3 dibutuhkan seseorang yang benar-benar mampu dalam mengunakan/mengoperasikannya, baik dalam mengolah data ataupun memilih data mengenai kesehatan yang akan di informasikan kepada masyarakat melalui website Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat *www.diskes.jabarprov.go.id*.

4.2 Hasil Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Memberdayakan SIM SP3 Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Hasil adalah segala sesuatu yang telah di raih oleh seseorang atau organisasi yang dapat memberikan kegunaan dan manfaat tertentu bagi orang lain. Hasil kerja merupakan salah satu bentuk yang dapat memberikan keuntungan kepada orang banyak, dari hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat tersendiri. Pencapaian atau hasil yang baik adalah suatu hal yang selalu di inginkan dan di harapakan oleh setiap orang atau bahkan oleh setiap organisasi.

Salah satu contohnya yaitu pada kerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam memberdayakan SIM SP3 untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk mendapatkan hasil kerja yang baik aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berusaha untuk memberikan pelayanan melalui SIM SP3. Hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur, harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, hal ini dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan, sehingga akibatnya akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efesien.

Salah satu upaya aparatur Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam memberdayakan SIM SP3 untuk menjadikannya sebagai suatu cara dalam menciptakan hasil kerja yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan pelayanan melalui SIM SP3 diharapkan dapat mencakup ukuran persepsi publik tentang hasil yang baik. Hasil yang baik dapat diukur, jika hasil tersebut dapat bermanfaat dan disajikan secara komparatif dengan hasil sebelumnya yang menyangkut target, tujuan, atau sasaran, norma, atau standar yang diterima secara umum. Ukuran itu mencakup akibat tidak lansung yang signifikan, dimaksud atau tidak dimaksud, positif atau negatif, yang terjadi akibat pemberian pelayanan.

Kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan suatu organisasi atau instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. Usaha meningkatkan hasil kerja aparatur harus dimulai dengan memusatkan perhatian kepada sekelompok masalah yang berkaitan, termasuk teknologi, struktur organisasi, budaya organisasi, perubahan sifat pekerjaan dan pekerja, kebutuhan akan pelayanan pada masyarakat yang lebih baik. Proses peningkatan kinerja aparatur memberi kesempatan terbaik untuk membangun pengalaman yang terus berkembang. Untuk meningkatkan hasil, kinerja aparatur yang berarti harus berusaha mencapai tingkat terbaik, upaya tersebut seharusnya menjadi aspek manajemen rutin yang berkesinambungan.

Hasil adalah berupa keluaran (*output*) yang dihasilkan dari pengolahan data-data yang ada pada SIM SP3 dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai informasi tentang kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Tujuan atau sasaran organisasi yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berupa bagaimana kualitas pelayanan dan kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. Tujuan atau sasaran yang dimaksud adalah pertama untuk mendorong tingkat pendidikan,kesehatan, dan kompetensi kerja masyarakat Jawa Barat. Bagaimana tingkat pendidikan aparatur yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam mengelola dan memberdayakan SIM SP3, bagaimana kualitas pelayanan kesehatan dan kuantitas dari kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan kompetensi kerja masyarakat dalam menilai kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kedua menjadikan mayarakat Jawa Barat yang sehat, berbudi pekerti luhur serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak.

Hasil dari tujuan dan sasaran yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*), usaha dan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir kurun waktu (periode) yang ditetapkan atau tertentu, tibalah saatnya untuk melakukan penilaian yaitu membandingkan antara hasil kerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa barat dengan tujuan atau sasaran yang di inginkan. Sasaran-sasaran tersebut diteliti dan mana sasaran yang telah dicapai sepenuhnya atau mana yang telah memenuhi target dan mana yang belum memenuhi target atau belum sepenuhnya.

Para aparatur khususnya aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, harus memiliki motivasi yang baik dalam kinerja. Motivasi merupakan cara yang digunakan untuk merangsang pegawai untuk mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pentingnya motivasi bagi aparatur, karena terdapat beberapa hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku aparatur supaya mau bekerja untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Bentuk motivasi kepada aparatur tidak bisa disamaratakan, karena tergantung kondisi sosial dan pendidikannya.

Penerapan motivasi yang dilakukan terhadap aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dilakukan dengan dua cara yaitu, Pertama motivasi langsung motivasi yang diberikan baik materil (uang) maupun nonmateril (penghargaan) secara langsung pada setiap aparatur untuk memenuhi kebutuhan dan tercapainya kepuasaan. Pemberian motivasi ini biasanya dalam bentuk ucapan pujian, penghargaan, dan bonus berupa uang, Kedua motivasi tidak langsung merupakan

pemberian motivasi dalam bentuk fasilitas-fasilitas pendukung dalam menunjang semangat kerja atau kelancaran tugas aparatur dalam bekerja melayani masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan hasil kerja aparatur untuk mewujudkan professional aparatur.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan secara baik (*good-governance*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik, memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain adalah unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik. Terabaikannya unsur profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Profesionalisme disini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif dan tidak hanya sekedar kecocokan keahlian dengan tempat penugasan. Sehingga aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kedalam kegiatan dan program pelayanan.

Terbentuknya aparatur profesional menurut pendapat diatas memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan sebagai instrumen pemutakhiran. Pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh aparat memungkinnya untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan prosedur yang sederhana. Sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi aparatur untuk bekerja secara profesional serta mampu merespon perkembangan global

dan aspirasi masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai pelayanan yang responsif, inovatif, efektif, dan mengacu kepada visi dan nilai-nilai organisasi.

Organisasi yang berbasis pengetahuan dicirikan oleh penggunaan informasi yang itensif serta pengetahuan sebagai sumber untuk menarik masayarakat dan aparatur serta teknologi informasi sebagai instrument mengelola organisasi. Setiap organisasi membutuhkan pengelola, dan pengelola tersebut tidak lain adalah aparatur yang terdapat didalamnya dalam memberdayakan SIM SP3 untuk meningkatkan kinerja dan unsur-unsur sumber daya aparatur sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan *kecerdasan* dan bakat aparatur.

Sumber daya aparatur merupakan faktor dan modal utama yang dapat menunjang kinerja dalam memberdayakan SIM SP3. Struktur organisasi sangat penting untuk mengetahui tata hubungan kerja antara apartur eksekutif dengan pelaksana. Berdasarkan wawancara, untuk meningkatkan hasil dari adanya SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, diperlukan adanya sikap dalam menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan.

Hal ini diperlukan sikap seorang pemimpin yang benar-benar dapat membantu bawahan unuk mendapatkan kinerja aparatur yang efektif dan efisien, menurut hasil wawancara dengan Staf Sub bidang TIK, sikap perilaku pimpinan Kepala Seksi TIK memiliki model Konsiderasi, yang memiliki ciri ciri, pertama ramah tamah, kedua mendukung dan membela bawahan, ketiga mau berkonsultasi, keempat mau mendengarkan pendapat bawahan, kelima mau menerima usul bawahan, keenam memikirkan kesejahteraan bawahan, ketujuh

memperlakukan bawahan setingkat dirinya. Tidak hanya memmentingkan kebijakan-kebijakan dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil uraian diatas, bahwa perilaku pemimpin Konsiderasi, di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat khususnya di bidang TIK, dapat memberikan arahan yang positif bagi aparatur sebagai bawahan untuk meningkatkan kinerja aparatur di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah termasuk memiliki kecepatan dalam mengolah data, hal ini tidak terlepas dari pengaruh seorang pemimpin. Norma merupakan aturan-aturan bagi para aparatur, dengan adannya norma dapat membatasi sikap aparatur agar tidak bertindak sewenang-wenang. Norma atau aturan tersebut jelas akan mempengaruhi sikap aparatur dalam menjalankan tugasnya, norma diperlukan agar dalam bertugas mereka tetap memperhatikan dan memperdulikan norma yang ada.

Norma sangat diperlukan oleh aparatur, karena dengan adanya norma aparatur dalam melaksanakan tugasnya dapat terstruktur dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Norma atau aturan juga dapat mempengaruhi sikap aparatur dalam menjalankan tugasnya, karena apabila mereka bertindak sewenang-wenang maka dengan adanya aturan tersebut dapat mencegah hal tersebut.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sebagai organisasi pemerintah dibidang pembangunan kesehatan selalu memperhatikan norma atau aturan yang berlaku, karena mereka juga menginginkan pelaksanaan SIM SP3 dapat berhasil dicapai. Selain itu juga dengan adanya norma atau aturan maka dapat menciptakan

kedisipilinan di antara mereka, mereka juga akan bekerja dengan disiplin demi mencapai keberhasilan pelaksanaan SIM SP3.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bidang TIK, norma atau aturan tersebut berasal dari peraturan yang berlaku di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan sudah pasti sesuai dengan peraturan dan tata tertib Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan aturan tersebut mereka melaksanakan tugas sebagai pelaksana pelayanan SIM SP3, sehingga aturan tersebut dapat mempengaruhi sikap pelaksana pelayanan SIM SP3.

Pengaruh dari adanya norma atau peraturan tersebut adalah sikap dari pelaksana pelayanan SIM SP3, mereka lebih disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dilakukan agar keberhasilan SIM SP3 bisa tercapai, walaupun pada kenyataannya pelaksanaan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat belum optimal karena belum terintegrasikan secara keseluruhan. Akan tetapi sebagai pelaksana pelayanan SIM SP3 mereka tetap menjalankan kedisiplinan tersebut demi terciptanya akselerasi pelayanan SIM SP3 yang efektif dan efisien.

Aturan yang berlaku di lingkungan Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sebagai pelaksana SIM SP3 merupakan langkah pemerintah untuk memberikan peringatan kepada pelaksana pelayan SIM SP3 dalam menjalankan tugasnya. Maksud dari peringatan tersebut bertujuan agar pelaksana pelayanan SIM SP3 dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, dengan adanya norma-norma tersebut pihak pelaksana pelayanan SIM SP3 akan dibatasi sikapnya, mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan

pribadinya melainkan menjalankan tugas guna kepentingan pemerintah dan negara.

Norma-norma yang berlaku tidak hanya berasal dari perturan-peraturan yang bersifat lebih lebih tinggi kedudukan hukumnya, melainkan ada juga norma-norma yang berasal dari aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga wajib diperhatikan oleh pelaksana pelayanan SIM SP3. Norma-norma tersebut merupakan kedisiplinan dalam bekerja, saling menghormati antara pelaksana peleyanan dan tentunya tetap konsisten dalam pelaksanaan SIM SP3. Norma-norma yang ada bukan menjadi kendala bagi aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, melainkan mereka tetap konsisten dan tetap jujur dalam melaksanakan SIM SP3.

Melalui norma atau aturan tersebut, akselerasi pelyanan SIM SP3 yang efektif dan efisien dapat tercipta. Tugas-tugas aparatur yang dilakukan dengan menggunakan SIM SP3 seperti pengumpulan data mengenai kesehatan memang belum terlaksana dengan maksimal karena masih adanya kendala, akan tetapi pelaksanaan SIM SP3 yang dilakukan sudah dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan atau dalam artian sudah dapat menciptakan akselerasi pekayanan SIM SP3 yang cukup efektif dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut, bahwa norma atau aturan dapat mempengaruhi sikap pelaksana pelayanan dan juga melalui norma atau aturan pelaksanaan SIM SP3.

Strategi pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur sangat diperlukan oleh pengguna SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini yaitu bagi para manajemen dan bagi pengelola dan teknisi sistem

informasi, maka diharapkan terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas. Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang pertama, yaitu bagi para manajemen dengan menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap pentingnya sistem informasi. Setelah ada pemahaman terhadap sistem informasi akan menjadikan kepedulian bahwa sistem informasi merupakan suatu kebutuhan. Karena dengan adanya sistem informasi dapat mempermudah dalam proses pelayanan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Kedua, bagi pengelola dan teknisi sistem informasi, yaitu dengan melakukan peningkatan dan pembinaan kemampuan manajerial dan kemampuan teknis melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat internal yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan di bidang manajemen dan teknologi informatika. Untuk kedepannya perlu *re-training* seiring dengan perkembangan teknologi informatika, pendidikan formal di bidang teknologi informatika, serta pola karir yang jelas dan terarah.

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang handal, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat harus membuat program peningkatan kompetensi sumber daya aparatur yaitu melalui pelatihan pengembangan aplikasi. bertujuan bagi para pengelola aplikasi agar setiap aplikasi yang mengalami perubahan atau peremajaan dapat diikuti dan dilaksanakan oleh pengelola dengan baik. Selain itu perlu *re-training* untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi di bidang perangkat keras dan perangkat lunak, maka secara periodik perlu direncanakan pendidikan atau pelatihan untuk refreshing khusus bidang teknologi informasi.

Selain pelatihan dan *re-training*, yang paling penting adalah bagaimana aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam membudayakan penggunaan komputer. Penggunaan komputer sebagai sarana guna menunjang kegiatan sehari-hari perkantoran membutuhkan waktu untuk sosialisasi. Untuk itu, penggunaan komputer harus bergeser dari pemahaman pribadi/khusus kepada alat yang dapat digunakan bagi semua orang. Pemahaman eksklusif harus digeser pada pengertian sebagai alat yang perlu untuk digunakan untuk semua orang sehingga dalam waktu yang tidak relatif lama budaya penggunaan komputer telah tersosialisasikan.

Penggunaan komputer untuk kegiatan harian perlu adanya motivasi dan dorongan secara terus menerus. Salah satu pemacu kearah itu adalah peran pimpinan yang harus dapat menjadi *leader* serta merupakan prioritas utama bagi sosialisasi penggunaan komputer. Sehingga budaya penggunaan computer sudah tidak asing lagi dan dapat diterima.

Strategi pemutusan upaya di bidang infrastruktur, dilakukan melalui pendekatan pembangunan infrastruktur dasar dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan metode kemitraan saling menguntungan dengan *stakeholder* atau institusi yang kompeten dengan tetap berada pada koridor hukum dan peraturan yang berlaku.

Meningkatkan pemberdayaan, pemeliharaan dan perawatan SIM SP3 secara keseluruhan yang meliputi semua kompunen atau aspek terlibat seperti sumber daya aparatur, perangkat keras, perangkat lunak, data kesehatan dan lain

sebagainya. Strategi ini sangat penting guna menjamin kelancaran operasional yang optimal dan berkesinambungan.

Faktor pembinaan kemampuan SDM merupakan prioritas, sehingga dalam jangka panjang secara mandiri mampu melakukan pemberdayaan, pemeliharaan dan menjawab *problem* yang terjadi pada perangkat keras, perangkat lunak dan data dengan cepat dan baik. Kemampuan SDM merupakan faktor penting , sebab SDM inilah yang akan menggunakan dan mengoperasikannya SIM SP3.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Sikda melalui SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Sumber Daya aparatur, merupakan kebutuhan mutlak yang harus dilaksanakan pada setiap kinerja aparatur yang berkompetensi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar pelayanan. Pengembangan sumber daya aparatur di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat diarahkan kepada pembentukan kualitas layanan dalam SIM SP3 melalui peningkatan sumber daya pendidikan dan pelatihan atau diklat pada aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat dipengaruhi oleh mutu SDM kesehatan yang bekerja di institusi kesehatan, baik yang bekerja di unit pelayanan kesehatan, unit penunjang kesehatan maupun unit administrasi kesehatan. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu SDM kesehatan perlu mendapat perhatian.

Peningkatan mutu SDM kesehatan diselenggarakan melalui berbagai upaya, di antaranya melalui kegiatan pendidikan dan latihan (diklat) tenaga kesehatan. Penyelenggaraan kegiatan diklat tenaga kesehatan ini tersebar di berbagai institusi kesehatan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 558 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen Kesehatan, maka tugas pokok Pusdiklat Pegawai Departemen Kesehatan RI adalah: melaksanakan, mengkoordinasikan, dan membina diklat pegawai di lingkungan Departemen Kesehatan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan UU yang berlaku.

Salah satu fungsi Pusdiklat adalah melakukan pengumpulan dan pengolahan data disamping, melakukan analisa dan pengkajian program diklat, mengikuti perkembangan *monitoring* dan menyusun laporan penyelenggaraan program diklat, namun sampai saat ini belum diperoleh data yang optimal tentang penyelenggaraan kegiatan diklat tenaga kesehatan, karena mekanisme pencatatan dan pelaporan kegiatan diklat belum berjalan dengan baik dan belum menjangkau seluruh diklat. Penyebab utama dari hal tersebut karena belum adanya kesamaan dalam pemahaman dan pelaksanaan pencatatan serta pelaporan kegiatan diklat di tiap tingkat administrasi, maka untuk memperoleh data yang akurat tentang pelaksanaan kegiatan diklat tenaga kesehatan, maka perlu disusun pedoman pencatatan dan pelaporan kegiatan diklat yang dapat dijadikan acuan oleh semua unit yang melaksanakan diklat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Pelatihan dapat juga dilakukan secara khusus untuk mengubah kepuasan dan motivasi kerja bilamana dibutuhkan. Pentingnya pelatihan dan pengembangan menghendaki kegiatan ini dilakukan dengan baik melalui langkah-langkah tertentu, yaitu analisis kebutuhan (kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, kebutuhan pegawai), penentuan tujuan dan materi latihan, pemilihan metode latihan yang tepat dan evaluasi pelatihan.

Berdasarkan pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya aparatur supaya lebih profesional. Pengembangan sumber daya aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan. Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada aparatur supaya bisa meningkatkan kinerja aparatur sehingga profesional pegawai dapat terwujud. Karena dengan adanya pelatihan pegawai untuk mengembangkan sumber daya aparatur tersebut bisa melaksanakan tugasnya secara profesional, artinya pegawai yang bekerja sesuai dengan tugas dan jabatannya. Pelayanan masyarakat melalui SIM SP3 merupakan usaha dari aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam memberikan kemudahan bagi setiap aparatur dan masyarakat untuk memperoleh informasi. Keberadaan SIM SP3 yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, menginginkan semua kebutuhan informasi dapat disampaikan kepada seluruh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam mendukung pengambilan keputusan maka dibutuhkan SDM/pengelola data yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer, sarana/prasarana yang komplit dan menambah fasilitas komputer sehingga tidak tergantung dengan satu unit

komputer saja dalam pengelolaan data atau informasi dan biaya untuk pengelolaan data atau informasi. Berdasarkan uraian di atas maka untuk memenuhi data dan informasi yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melalui SIM SP3 dalam pengambilan keputusan, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat harus menambah sarana/prasarana seperti fasilitas komputer dan jaringan internet serta SDM/pengelola data yang mampu mengoperasikan SIM SP3.

Selain melakukan pelayanan yang cepat dan akurat perlu ditingkatkan kualitas SDM aparatur, agar tercipta pelayanan yang efektif. Selain itu juga prosedur atau cara kerja aparatur harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kualitas layanan merupakan salah satu penentu keberhasilan kinerja aparatur memberadayakan SIM SP3 guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan aparatur bertujuan agar aparatur dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan, supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan SIM SP3. Pelaksanaan SIM SP3 sangat membutuhkan aparatur yang ahli dalam bidang teknis untuk mengoperasionalkan dan mengaplikasikan data-data mengenai kesehatan yang tersimpan dalam aplikasi SIM SP3.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam melakukan pelayanan yang cepat dan akurat perlu ditingkatkan kualitas SDM aparatur, agar tercipta pelayanan yang efektif. Selain itu juga prosedur atau cara kerja aparatur harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kualitas layanan merupakan salah satu penentu keberhasilan kinerja aparatur memberadayakan SIM SP3 guna

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan aparatur bertujuan agar aparatur dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan, supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam penanganan SIM SP3. Pelaksanaan SIM SP3 sangat membutuhkan aparatur yang ahli dalam bidang teknis untuk mengoperasionalkan dan mengaplikasikan data-data mengenai kesehatan yang tersimpan dalam aplikasi SIM SP3.

4.3 Kaitan Usaha dengan Pencapaian Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Memberdayakan SIM SP3 Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah salah satu organisasi yang ada di Provinsi Jawa Barat yang merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Kesehatan adalah kebutuhan utama manusia dimana pun berada, selain pangan, sandang, papan dan pendidikan. Sektor ini tidak akan menghilang selama manusia masih mempunyai masalah terhadap kesehatannya. Didukung pertumbuhan pendapatan ekonomi yang semakin membaik dan semakin banyaknya orang telah berpendidikan baik, maka sektor ini akan terus berkembang dari segi teknologi dan pelayanannya.

Organisasi merupakan suatu kesatuan unit kerja yang didalamnya diwajibkan terjalinnya interaksi. Tanpa adanya interaksi mustahil akan adanya transformasi informasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur bidang TIK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat interaksi yang dilakukan oleh seluruh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah dalam hal pengumpulan data.

4.3.1 Efisiensi Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Memberdayakan SIM SP3 Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Organisasi publik dikatakan efektif dan efesien apabila dalam realita pelaksanaannya birokrasi dapat berfungsi melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*client*), artinya tidak ada hambatan (sekat) yang terjadi dalam pelayanan tersebut, cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan, serta mampu memecahkan fenomena yang menonjol akibat adanya perubahan sosial yang sangat cepat dari faktor eksternal. Sudah seharusnya setiap instansi pemerintah baik yang bergerak di bidang jasa pelayanan untuk lebih mengoptimalkan pelayanannya kepada publik. Hal ini seperti tercantum dalam visi dan misi serta tujuan dari instansi tersebut. Instansi pemerintah saat ini kurang mampu bersaing dengan pihak swasta dalam penyediaan pelayanan jasa dikarenakan tidak dimilikinya konsistensi dan produktivitas kerja yang handal dari instansi pemerintahan.

Banyak alasan yang digunakan oleh pihak instansi pemerintah dalam menutup kelemahan tersebut, seperti kurangnya insfrastruktur, modal, maupun sumber daya manusia yang handal. Padahal jika dicermati dari pihak swasta semua hal tersebut hampir sebanding dan sama rata. Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk mampu bersaing dengan pihak swasta, tidak ada salahnya apabila pihak instansi mau belajar dan bekerja dari pihak swasta khususnya dalam bidang pelayanan kepada publik, karena kedua belah pihak sama-sama ingin memberikan konstribusi yang efektif dan efesien kepada masyarakat yang memerlukan jasa.

Efesiensi merupakan faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan aparatur maka yang dapat di simpulkan bahwa, salah satu untuk mengukur efesiensi dari SIM SP3 yang di terapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah dengan menilai dari pemusatan dan manfaat yang di rasakan oleh masyarakat atau pun aparatur dalam memberikan informasi mengenai kesehatan.

Pemusatan upaya merupakan strategi dalam hal, cara, hasil atau proses kerja memusatkan upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit. Pemusatan upaya adalah memfokuskan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang dipilih. Pemusatan upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah dengan penyedian sumber daya manusia yang memadai, perbaikan infrastruktur, perawatan sistem dengan kualitas yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pemusatan upaya yang dilakukan dalam penggunaan SIM SP3 bagi para aparatur adalah mempermudah aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan peningkatan kualitas proses pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu faktor yang berpengaruh supaya terciptanya peningkatan efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara para pelaksana SIM SP3 yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Komunikasi, merupakan syarat pertama bagi keberhasilan kinerja aparatur, dimana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi antar pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, khususnya para aparatur bidang TIK dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Mengembangkan kapasitas SDM, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e – literacy* masyarakat. Sumber Daya Manusia baik sebagai pengembang, pengelola maupun pengguna *e – Government* marupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan suatu sistem.

Pengembangan sumber daya aparatur dalam memberdayakan SIM SP3 yang dilakukan oleh bidang TIK Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat secara konseptual dapat juga mengubah sikap pegawai terhadap pekerjaan. Hal ini disebabkan pemahaman pegawai terhadap pekerjaannya juga berubah, karena sikap seseorang aparatur memiliki elemen-elemen kognitif, yaitu keyakinan dan pengetahuan seseorang terhadap suatu obyek.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyimpanan data mengenai informasi kesehatan kepada masyarakat melalui SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terjadi karena tidak tepat waktu, penumpukan data dan tidak akurat. Selain itu di pengaruhi faktor SDM, Keberadaan SDM ini posisinya sangat mutlak dalam suatu kegiatan organisasi, maka salah satu hal yang perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dari sumber daya manusia yaitu para aparatur dilingkungan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabpaten/Kota sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar semakin mempunyai kemampuan teknis dan manajerial untuk melayani kepentingan dan kebutuhan pengguna jasa.

Upaya peningkatan potensi dan kapabilitas SDM melalui jenjang pendidikan dan berbagai program pembangunan yang multi dimensi apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak. karena mutu SDM yang berpendidikan relatif tinggi tentunya wawasan, pengetahuan dan pemahaman terhadap pekerjaan pun akan mampu mengimbangi tuntutan dan perubahan yang kompleks dan bergerak cepat. Peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi melalui diklat adalah berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai tantangan reformasi dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan yang ada .

Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang nyata untuk meningkatkannya. Oleh karena itu diklat perlu terus ditingkatkan agar SDM aparatur benar-benar memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Disinilah kompetensi menjadi satu karakteristik yang mendasari individu atau aparatur untuk mencapai kinerja tinggi

dalam pekerjaannya. Karakteristik itu muncul dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku (*attitude*) untuk menciptakan aparatur yang memiliki semangat pengabdian yang tinggi dalam melayani masyarakat yang selalu bertindak hemat, efisien, rasional, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, diperlukan strategi peningkatan kompetensi SDM aparatur, dimana kompetensi yang memadai merupakan sesuatu yang sangat mutlak yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Kesehatan provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas bahwa kendala proses penyimpanan data mengenai informasi kesehatan yang ada dilingkungan puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat karena faktor SDM, karena manusia adalah motor penggerak segala sesuatu kegiatan, untuk mendapatkan SDM yang efektif diperlukan kemampuan aparatur yang memiliki kemampuan dibidangnya dan teknologi informasi terus berkembang sesuai dengan zaman. Sehingga ada kemungkinan perubahan basis pengembangan di masa depan, disertai dengan alasan teknis yang kuat dan mengarah kepada hasil akhir yang lebih baik.

Kinerja Aparatur merupakan salah satu faktor penting dalam pelayanan yang sangat dirasakan keberadaannya, apabila kinerja aparatur tidak dilaksanakan dengan tepat, maka hasil akhir tidak akan tercapai dengan memuaskan. Kinerja Aparatur dapat dicapai hasil akhir yang sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah ditentukan, maka fungsi kinerja harus mampu berjalan seefektif mungkin.

Seorang pemimpin harus benar-benar mengetahui, menguasai, mendalami dan menghayati. Selanjutnya dapat menerapkannya dan melaksanakannya dengan tepat kepada setiap individu, sedangkan pelaksanaan itu sendiri harus benar-benar menguasai setiap rangkaian dari pada gerak ke arah tujuan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab, maka diharapkan dapat menimbulkan pelayanan yang baik tanpa ada paksaan. Hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur, yang menjalankan tugas penuh tanggung jawab, dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Akibatnya akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efesien.

Beradsarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat keberadaan SDM ini posisinya sangat mutlak dalam suatu kegiatan organisasi, maka salah satu hal yang perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan dari sumber daya manusia yaitu para aparatur dilingkungan Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabpaten/Kota sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar semakin mempunyai kemampuan teknis dan manajerial untuk melayani kepentingan dan kebutuhan pengguna jasa.

4.3.2 Biaya Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Memberdayakan SIM SP3 Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

SIM SP3 yang ada oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan dana atau modal yang tersedia. Pembelian alat-alat komputer, jaringan komunikasi ataupun sarana prasana yang memadai membutuhkan modal yang cukup agar implementasi Sistem Otomatisas Perkantoran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah digariskan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, bahwa Sumber daya finansial atau biaya sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan, karena semua program memerlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu kesiapan modal sangat diperlukan, seperti untuk pembelian alat-alat komputer, pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi lainnya. Modal sangat diperlukan untuk mensukseskan Kinerja aparatur dalam memberdayakan SIM SP3, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali memerlukan modal atau dana.

SIM SP3 yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan komputer yang lengkap serta terhubung dengan jaringan *internet*. Pembelian peralatan komputer serta jaringan internet dibutuhkan dana atau modal yang cukup agar kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bidang TIK, bahwa sumber daya finansial atau biaya sangat diperlukan untuk keberhasilan pelaksanaan SIM SP3. Oleh karena itu kesiapan modal sangat diperlukan, seperti untuk pembelian alat-alat komputer, pengadaan sarana dan prasarana serta pengadaan jaringan komunikasi lainnya.

Modal tersebut digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pembelian alat-alat komputer, pengadaan jaringan komunikasi berbasis data base dan tentunya jaringan *internet*. Selama ini kinerja aparatur dalam memberdayakan SIM SP3 masih mengalami sedikit kendala dan pelaksanaanya belum maksimal atau optimal, hal tersebut dikarenakan keterbatasan modal. Modal yang belum mencukupi, menjadikan pelaksanaan yang telah dijalankan mengalami kendala, kendala-kendala tersebut adalah adanya keterbatsan dana. Dana yang belum mencukupi dalam pengadaan sarana dan prasarana seperti dalam pembelian peralatan komputer dan pemasangan jaringan *internet* karena dalam pelaksanaan penerimaan dan pengiriman data masih bersifat manual yaitu melalui email *SP3_jabar@yahoo.co.id.*

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam kinerja aparatur karena tanpa adanya modal maka kinerja aparatur tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Hal tersebut dikarenakan untuk membangun SIM SP3 diperlukan peralatan komputer dan jaringan komunikasi yang luas seperti jaringan *internet* dan intranet. Selain itu perlu adanya perbaikan infrastruktur-infrasturktur yang dapat menunjang keberhasilan kinerja aparatur dalam pelaksanaan SIM SP3 sehingga memerlukan modal yang mencukupi.

Sumber daya anggaran atau modal sangat diperlukan untuk keberhasilan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan melalui SIM SP3, karena semua program memerlukan modal yang sangat banyak. Oleh karena itu sumber daya anggaran diperlukan, seperti untuk pengadaan sarana dan prasarana, pembelian alat-alat komputer dan pengadaan jaringan komunikasi. Pelaksanaan SIM SP3 masih belum maksimal hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan modal atau dana sehingga pelaksanaan SIM SP3 belum berjalan lancer sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Modal yang tersedia belum mencukupi, karena modal yang tersedia tidak setengahnya dari Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pengeluaran Belanja Nasional (APBN), sehingga menjadikan kebijakan yang telah dijalankan mengalami kendala. Kendala-kendala tersebut yaitu keterbatasan dana sehingga proses pelaksanaan SIM SP3 dalam penyampaian informasi mengenai kesehatan belum maksimal.

Modal yang ada belum mencukupi untuk pembelian atau pengadaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung keberhasilan SIM SP3, sarana dan prasarana itu seperti pengadaan komputer, pengadaan jaringan komunikasi secara *online*. Modal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam memberdayakan SIM SP3 sehingga dalam pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran. Selama ini, biaya atau modal dalam memberdayakan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dianggarkan dari APBD dan APBN.

4.4 Informasi Penjelas Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Memberdayakan SIM SP3 Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pengembangan teknologi pada aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat terus di kembangkan. Saat ini teknologi informasi mulai di kembangkan agar dapat membantu pengembangan kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya teknologi informasi dalam mendukung kemajuan pertukaran informasi yang semakin dominan di dunia. Teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat pada permasalahan kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat merupakan faktor yang bisa menentukan keberhasilan dalam memberdayakan SIM SP3 Pada Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat. Penyampaian informasi SIM SP3 itu sendiri dilakukan di tiap bagian Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, bentuk penyampaiannya melalui penjelasannya adalah bahwa Aplikasi SIM SP3 ini adalah Aplikasi yang akan memudahkan kinerja aparatur Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur, baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan pengguna jasa dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan,

berarti keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya pelayanan, keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan keterangan aparatur Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat.

Penyampaian informasi yang jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat, tentunya akan meningkatkan kinerja yang prima karena sudah jelas dan dimengerti oleh aparatur Dinas Kesehatan Provinsi jawa Barat dalam memberikan kejelasan informasi tentang penerapan SIM SP3. Pihak pelaksana kebijakan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah menjalankan langkah – langkah yang baik dalam mengupayakan kejelasan penyampaian informasi dalam penerapan SIM SP3, diantaranya adalah dengan membuat buku pedoman teknis pelaksanaan SIM SP3.

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah dimengerti oleh tiap Kepala Bagian, Sehingga dalam proses kinerja aparatur dari SIM SP3 adalah dapat melihat data mengenai kesehatan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Proses SIM SP3 merupakan data yang diolah dari tingkat Puskesmas yang dikirim kepada Dinas kesehatan Kabupaten/Kota untuk diolah kembali dan dikirim kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk diolah kembali, kemudian dikirim kembali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Kompleksnya data dan kebutuhan akan kesehatan maka dibutuhkan suatu unit yang dapat mengelola berkas kesehatan (unit kesehatan), agar dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, maka berkas mengenai kesehatan harus melalui beberapa tahapan dimulai dari retrieval, distribusi, *assembling*, *coding* dan *filling*. Dimana setiap tahapan tersebut harus saling menunjang satu dengan yang lainnya untuk dapat mendukung SIM SP3, dengan penggunaan SIM SP3 yang baik diharapkan dapat membantu pengumpulan data yang berasal dari berkas kesehatan untuk menunjang kegiatan pencatatan dan pelaporan statistik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Kenyataan yang terjadi di beberapa Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, SIM SP3 yang digunakan masih ada yang manual dan semi komputer sehingga sumber data untuk pencatatan dan pelaporan mengenai kesehatan yang ada menjadi terhambat. SIM SP3 yang baik adalah SIM SP3 yang mampu mencapai tingkat efisien dan efktivitas dalam mendukung pencatatan dan pelaporan statistik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dikatakan efektif jika SIM SP3 mampu memenuhi tujuan dari kegiatan pencatatan dan pelaporan statistik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sedangkan dikatakan efisien jika dalam pencapaian tujuan tersebut digunakan tenaga sumber daya yang seminimal mungkin (dalam segi waktu, tenaga SDM dan biaya).

SIM SP3 yang merupakan bagian dari SIK atau Sikda, merupakan salah satu pencatatan dan pelaporan data yang masih sering ditemukan kendala dalam prosesnya. Kendala yang biasanya muncul dalam SIM SP3 yaitu akibat belum terintegrasinya data dan alur proses pengiriman data juga sistem pengolahan masih menggunakan manual dengan program excel. Selain itu, adanya

keterbatasan SDM terutama tenaga kesehatan yang mengelola SIM SP3 dilihat dari keefektifitasan kerjanya.

Berdasarkan segi pemanfaatan data pun masih kurang dirasakan pemanfaatnya oleh pihak-pihak terkait di masing-masing program maupun bagi lintas sektor. Prosedur tetap (Protap) yang sudah disusun oleh Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi tidak berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari feedback yang diperoleh dari SIM SP3 yang disusun dari masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, masih kurang terjalinnya koordinasi antara pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan SIM SP3.

Informasi yang jelas dalam pelaksanaan SIM SP3 sangat bermanfaat bagi terciptanya efektifitas den efisiensi kerja pegawai. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam melaksanakan SIM SP3 Pada Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat dibutuhkan kejelasan informasi, baik dalam hal perencaan, pelaksanaan kinerja maupun yang berbentuk laporan *Hard Copy*.

Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan dalam menyampaikan informasi ini belum dapat dikatakan dengan baik, karena salah satu pemantapan dan pengembangan sistem informasi kesehatan melalui pengumpulan data di tingkat bawah maupun yang dihadapi baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi pada proses pelaksanaannya masih banyak masalah dan kendala. Upaya pemecahan masalahnya antara lain melalui SIM SP3 yang merupakan sebagian kecil dari SIK yang telah di akui sebagai sumber data yang berasal dari Puskesmas dan dapat dimanfaatkan diberbagai jenjang administrasi, yang sejak

tahun 1981 disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP).

SIM SP3 Revisi I mulai dilaksanakan pada tahun 1996, sebagai penyempurnaan terhadap bentuk pelaporan yang ditetapkan pada tahun 1981. Perkembangan SIM SP3 telah mengalami perubahan-perubahan sejak tahun 1996 sampai sekarang dalam upaya pembenahan utnuk penyesuaian pemanfaatan data yang selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan waktu.

Dari hasil supervisi dan pemantauan yang dilaksanakan oleh tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Puskesmas, masih banyak hal-hal yang menjadi halangan dalam melaksanakan SIM SP3 baik menyangkut tentang pencatatan, pengolahan maupun pelaporannya. Hal-hal yang berakibatkan laporan SIM SP3 menjadi tidak lengkap, tidak tepat waktu dan kebenarannya yang diragukan dapat di identifikasikan antara lain meliputi, pertama data yang dilaporkan tidak semua dapat dimanfaatkan baik dari aspek *monitoring* maupun dari aspek evaluasi, kedua tidak adanya atau kutang petugas khusus dibidang informasi baik di tingkat Puskesmas maupun tingkat yang lebih tinggi, ketiga kurangnya sarana dan prasarana untuk pencatatan, pengolahan, maupun pelaporan, keempat kurang terampilnya petugas penyedia, pengumpul dan pengolah data dan pembuat laporan, kelima kurangnya tingkat kesadaran petugas akan pentingnya dan manfaatnya data dan informasi, keenam semua kegiatan harus dicatat selengkap mungkin, meskipun yang dilaporkan terbatas.

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan informasi, maka tahun 2008 sistem pelaporan ini disempurnakan kembali sebagai Revisi II. SIM SP3 Revisi II merupakan “SIM SP3-Program” yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan para pemegang, pengelola maupun pelaksanaan program di masing-masing tingkatan administrasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka bukanlah sesuatu yang mengada-ada dalam penyusunan SIM SP3, pemegang, pengelola atau pelaksana program disemua tingkatan administrasi mempunyai peran yang sangat penting demi tercapainya “*Evidence Based*”. Pembenahan SIM SP3 diharapkan dapat menghilangkan faktor masalah yang ada saat ini.

Semua pihak sangat menyadari kepentingan SIK bagi pengetahuan akan kondisi kesehatan masyarakat dan pengutamaan yang akan perlu dilakukan di dalam menghadapi berbagai masalah kesehatan masyarakat. Disadari bahwa dengan banyak masalah kesehatan yang dapat diungkap oleh sistem informasi kesehatan, maka suatu pengutamaan akan perlu dilakukan.

Para petugas dan pengelola dalam sistem informasi kesehatan ini dapat mengetahui bahwa beberapa masalah kesehatan seperti malaria, pneumonia dan diare adalah masalah kesehatan utama yang penting pengamatannya di lapangan dan penting pula untuk ditanggulangi. Banyak sudah tahu bahwa masalah-masalah kesehatan itu sudah bersifat endemik. Akan tetapi bagaimana secara persis memantau atau mendeteksi suatu kejadian yang menuju keadaan wabah para petugas masih membutuhkan banyak upaya belajar. Beberapa petugas tahu bahwa respons berupa tindakan tertentu (contohnya penyemprotan dalam kejadian luar

biasa malaria) memberi efek yang dirasakan baik, akan tetapi bila dan sejauh mana tindakan semacam ini diperlukan tidaklah diketahui.

Struktur pencatatan dan pelaporan merupakan aspek yang menonjol dalam SIK karena perwujudannya sangat nampak dalam kegiatan sehari-hari. Sejumlah form dengan berbagai tingkat ketelitian atau kerumitannya dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari para petugas. Jumlah form, item-item yang ada di dalamnya, aliran penyampaiannya, rekapitulasi dan analisisnya mengisi kesibukan petugas. Para petugas di semua tingkat mempunyai persepsi dan melakukan penilaian atas dokumen-dokumen SIK.

4.4.1 Faktor Subtansial Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Memberdayakan SIM SP3 Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Baik-buruknya suatu pemerintahan sangat tergantung pada baik-buruknya mesin birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan. Sementara itu, birokrasi pemerintah sangat bergantung pada SDM aparaturnya sebagai aparatur penyelenggara pemerintah. Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan *Good Governance* bersama dengan dua pilar lainnya, yaitu dunia usaha (*corporate governance*) dan masyarakat *(civil society).* Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Aparatur sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bertanggungjawab untuk merumuskan sekaligus melaksanakan langkah strategis dan upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil,

demokratis dan bermartabat. Untuk itu, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus selalu ditingkatkan dan menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan sosok SDM aparatur yang profesional, yang mempunyai sikap dan perilaku yang penuh kesetiaan, ketaatan, disiplin, bermoral, bermental baik, akuntabel dan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab sebagai pelayan publik yang baik. Untuk mendukung tujuan ini diperlukan suatu sistem pendayagunaan SDM aparatur yang baik dan tepat sebagai suatu proses berkelanjutan dari manajemen sumber daya aparatur.

Pengelolaan SIM SP3 pada dasarnya bertujuan untuk mengelola data dan menganalisa menjadi informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga kemampuan pegawai dapat lebih ditingkatkan supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna yang pada akhirnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kerangka mewujudkan tujuan tersebut sistem pengelolaan SIM SP3 perlu disusun secara baik dan benar agar dapat memenuhi harapan tersebut. Secara umum, pengelolaan SIM SP3 mencakup semua proses dalam mengolah data dan menganalisa menjadi informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Semua proses tersebut harus dapat disusun sistemnya secara baik sehingga dapat menghasilkan *output* yang baik pula. Dari semua proses tersebut, ada tiga unsur yang secara signifikan sangat berpengaruh dalam proses pendayagunaan aparatur, yaitu rekruitmen, pola karir dan pengukuran beban kerja pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bahwa faktor penting atau paling utama yang dapat mempengaruhi kinerja aparatur yaitu sumber daya aparatur. Karena sumber daya aparatur merupakan hal yang mutlak yang dibutuhkan oleh setiap organisasi atau instansi pemerintah. Sumber daya aparatur yang ada di suatu organisasi atau instansi pemerintah sebagai pelaksana suatu kegiatan seperti pengoperasian SIM SP3 yang akan menjadi tolak ukur suatu kinerja aparatur, apakah aparatur sudah mampu atau belum dalam pengoperasian SIM SP3.

Berdasarkan uraian diatas sumber daya aparatur merupakan faktor penting dalam pengelolaan sistem informasi yang terdapat di setiap instansi pemerintah khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bidang TIK dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat melalui SIM SP3. Karena sumber daya aparatur sebagai penggerak yang nantinya akan mengelola dan mengoperasikan sistem informasi yang ada di organisasi atau instasi pemerintah, seperti di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bidang TIK.

4.4.2 Faktor yang dapat dikontrol Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dalam Memberdayakan SIM SP3 Guna Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Pendayagunaan atau pemberdayaan mengandung makna adanya perubahan pada diri seseorang dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak memiliki kewenangan menjadi memiliki kewenangan, dari tidak mampu untuk bertanggung

jawab menjadi memiliki tanggung jawab terhadap sesuatu yang dikerjakan. Pemberdayaan aparatur memiliki arti memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melakukan suatu aktivitas dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Sebagai suatu sistem, pendayagunaan aparatur merupakan rangkaian aspek yang saling berhubungan dan saling terkait satu sama lain dan menjadi satu kesatuan, sehingga pelaksanaan pendayagunaan aparatur dapat berjalan secara optimal.

SIM SP3 merupakan salah satu sistem yang cukup efektif untuk mengolah data mengenai kesehatan, sistem informasi ini merupakan sarana pelayanan kepada masyarakat seperti laporan bulanan atau laporan tahunan informasi data mengenai penyakit. Faktor yang dapat dikontrol aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yaitu dengan pengadaan staf, karena dengan adanya pengadaan staf dapat meningkatkan kinerja aparatur.

Staf adalah salah satu sumber pelaksana yang penting, karena staf merupakan penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah adalah sedikitnya pejabat yang mempunyai keterampilan-keterampilan dalam pengelolaan, latihan-latihan yang diberikan kepada para pelaksana sudah cukup maksimal.

Tingkat kemampuan staf pada pelayanan SIM SP3 setidaknya mempunyai pengetahuan dalam bidang komputer dan mengetahui tentang proses pengelolaan data mengenai kesehatan. Staf yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam pelayanan SIM SP3 merupakan hal yang dapat menentukan keberhasilan pelayanan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dalam

hal ini staf yang memiliki potensi yang handal. Potensi staf yang handal pada pleyanan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari kriteria seperti faham dalam bidang komputer seperti pengoperasian SIM SP3.

Staf yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat khususnya pada bidang TIK, sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan ditambah dengan pelatihan mengenai proses pengelolaan data yang nantinya akan menunjang dalam pelaksanaan SIM SP3. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, hal tersebut dilaksanakan karena dalam pelayanan SIM SP3 dibutuhkan sraf yang ahli dan kompeten dalam menjalankan SIM SP3 demi menciptakan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan SIM SP3 di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat saat ini dapat dikatakan telah memilki staf yang cukup memadai di bidangnya khususnya di TIK dalam melaksanakan SIM SP3. Karena selain sudah memiliki kemampuan dalam bidang komputer, mereka juga diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada aparatur yang berkaitan dengan proses pengelolaan data sehingga para pelaksana SIM SP3 dapat menjalankan tugasnya.